**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah yang kurang berpihak pada pembangunan daerah perbatasan serta masih kurangnya personil, anggaran, fasilitas dan kesejahteraan, terjadinya perdagangan lintas batas ilegal, kurangnya akses dan media komunikasi serta informasi dalam negeri serta belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah dalam penanganan wilayah perbatasan. Sementara pada level internasional atau regional, permasalahan daerah perbatasan muncul sebagai akibat lemahnya kemampuan *loby* dan kreativitas pemerintah di tingkat nasional. Berbagai peluang yang ada, baik dari kawasan ASEAN dan juga pembangunan di tataran nasional ternyata tidak bisa terangkai dengan baik bagi upaya perwujudan pemenuhan hak ekonomi masyarakat. Berbagai kesenjangan prasarana dan sarana yang terjadi pada daerah perbatasan khususnya di daerah Nanga Badau, masih tetap belum di perhatikan sebagaimana mestinya.[[1]](#footnote-1)

Perbedaan kondisi sosial ekonomi di wilayah perbatasan antar negara seperti itu dapat menimbulkan efek negatif yang cendrung merugikan masyarakat wilayah perbatasan di Indonesia. Efek negatif tersebut misalnya adalah “perambahan” yang dilakukan oleh Negara tetangga (*backwash effect*)[[2]](#footnote-2) yang dapat terjadi secara disengaja atau tidak disengaja. Misalnya berupa “pemanfaatan” sumber daya alam oleh Negara tetangga tanpa adanya kompensasi dan kewajiban-kewajiban yang memadai. Hal ini selain dapat mengakibatkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan, juga menimbulkan gangguan terhadap kehidupan sosial penduduk di wilayah perbatasan Indonesia.[[3]](#footnote-3)

Pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu dari Negara tetangga ini juga berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi di Negara tersebut yang pada gilirannya dapat menimbulkan efek negatif yang disebut *polarization effect[[4]](#footnote-4),*Yaitu tertarik atau di tariknya sumber daya alam dan sumber daya manusia suatu negara ke negara tetangga untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan di wilayah negara tetangga tersebut yang berakibat terjadinya penggosongan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan negara yang tertarik sumber daya manusianya. Akibatnya terjadi ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia yang menyebabkan munculnya berbagai persoalan yang pada batas tertentu dapat mengakibatkan gangguan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena ini dapat terjadi karena mekanisme pasar yang bekerja diwilayah ini pada akhirnya memberi kesempatan kepada pihak-pihak tertentu dari negara tetangga untuk memperluas aktivitas ekonomi mencakup wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia.

Selain ketimpangan sosial ekonomi, wilayah-wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia juga di tandai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat berupa ikatan kekerabatan dengan keolompok masyarakat lain negara tetangga. Pada batas tertentu karakteristik seperti ini dapat menjadi kendala bagi pengelolaan dan pembangunan kawasan di wilayah perbatasan. Menyikapi berbagai persoalan di wilayah perbatasan, harus dirumuskan model pembangunan wilayah perbatasan yang dapat mengubah berbagai aspek negatif menjadi efek posisitif bagi daerah-daerah yang berada di wilayah perbatasan indonesia. Tulisan ini bermaksud menganalisis, menyusun dan merekomendasikan model kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan Negara, khususnya antara Kalimantan Barat dengan Serawak di Nanga Badau, yang dapat mengoptimalkan pemenuhan hak-hak ekonomi masyarakat perbatasan sekaligus memperkecil kesenjangan kesejahteraan masyarakat di garis perbatasan yang berbeda.

Pengelolaan perbatasan Negara merupakan rangkaian akhir dari proses pembentukkan perbatasan. **Stephen B. Jhones (1945)**[[5]](#footnote-5), sebagai salah satu ahli dibidang kajian perbatasan Negara khususnya perbatasan daratan menegaskan, bahwa aspek *management* (pengelolaan) perbatasan negara merupakan perkerjaan yang bersifat kontinu. Sebab, di dalam kegiatan pengelolaan tersebut menyangkut banyak aspek yang terkait dengan pelaksanaan kedaulatan negara itu sendiri, seperti pemeliharaan patok batas negara, lalu lintas orang dan barang, serta persoalan pertahanan dan keamanan negara itu sendiri. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila wilayah perbatasan memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan karena di ruang perbatasan tersebut akan selalu terjadi “pergesekan” atau interaksi dengan Negara tetangga, baik positif maupun negatif.

Berbagai program pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan kawasan perbatasan, baik secara fisik maupun sosial-ekonomi dan budaya masyarakatnya. Namun demikian, kondisi perbatasan tidak banyak mengalami perubahan, terlebih untuk bersaing dengan pesatnya pembangunan kawasan perbatasan dari negara tetangga, seperti Serawak Malaysia. Malaysia mampu membangun pusat-pusat pertumbuhan di perbatasannya melalui berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan yang telah memeberikan keuntungan bagi pemerintah maupun masyarakatnya.[[6]](#footnote-6)

Sementara masyarakat perbatasan, umumnya miskin dan secara ekonomi lebih berorientasi ke negara-negara tetangga dengan melakukan migrasi temporer maupun permanen dengan motif utama ekonomi, sebagaimana hal itu terjadi di sepanjang kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan serawak.[[7]](#footnote-7)Melihat kompleksitas persoalan pengelolaan perbatasan tersebut yang pada dasarnya berkutat pada masalah birokrasi yang egosentrisme[[8]](#footnote-8), maka benang merah yang bisa disimpulkan adalah adanya keinginan kuat untuk merevitalisasi kawasan perbatasan agar bisa seimbang dengan kemajuan pembangunan di kawasan perbatasan Negara tetangga (Serawak Malaysia). Namun sayangnya, dalm level tertentu semangat tersebut lebih dimotivasi oleh semangat kompetisi politisi yang bersifat reaktif, terutama jika muncul kasus-kasus yang bersinggungan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia maupun persoalan demokrasi yang tidak kunjung usai.[[9]](#footnote-9) Padahal, selaras dengan prinsip-prinsip umum yang digariskan PBB sebagaimana di atas maupun pilihan paradigm rezim pembatas lunak (*soft border regime)*[[10]](#footnote-10)yang di anut Indonesia, maka selayaknya pembangunan perbatasan tersebut memperhatikan saling terpengaruh *(interplay)* diantara kedua sisi perbatasan, sehingga pendekatannya adalah kerjasama lintas batas. Dalam kaitan ini, Guo[[11]](#footnote-11)telah memberikan landasan teoritis yang strategis diaplikasikan yakni *Cross Border Approach* (CBA).[[12]](#footnote-12)

CBA merupakan sebuah model pendekatan pembangunan perbatasan yang digagas oleh Roxing Guo.Dalam model ini, lebih mengutamakan pola kerjasama antar perbatasan untuk saling mengambil keuntungan dalam mengembangkan wilayah perbatasan di masing-masing negara. Pola kerjasama ini dapat dilaksanakan pada wilayah dengan karakteristik sebagai berikut,

1. Adanya perbedaan konsep pengembangan sosial ekonomi dengan wilayah tetangga
2. Adanya keterbatasan jaringan penghubung, baik jalan maupun telekomunikasi di kota yang merupakan pusat kegiatan

Melihat sifat dan karakteristik yang ditunjukan dari model-model pengelolaan perbatasan antara Indonesia dan malaysia, khususnya Kalimantan Barat dengan Serawak adalah model pengelolaan wilayah perbatasan *European Union* ditandai dengan suatu ciri khas yaitu “*totally Bordeless”.* Kebebasan bergerak orang dan barang di wilayah ini sangat ditunjang oleh kesamaan level kondisi perekonomian secara fisik, kognitif dan budaya. Kerjasama antara kedua negara didasarakan pada pembangunan perdagangan lintas batas (*tradebased border development).*Hal ini dikarenakan perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak Malaysia sesungguhnya adalah wilayah yang sangat potensial, strategis dan mempunyai potensi sumberdaya sejarah ekonomi.[[13]](#footnote-13)

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi kerjasama antara Indonesia-Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat-Sarawak?
2. Bagaimana kondisi perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kalimantan Barat-Sarawak?
3. Bagaimana kontribusi dari kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dalam pembangunan infrastruktur di perbatasan Kalimantan barat-Sarawak?
4. **Pembatasan Masalah**

Mengigat luasnya kajian penelitian ini, maka penulis akan membatasi masalah pada fokus pembahasan mengenai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan Kalimantan barat - Serawak melalui Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Indonesia – Malaysia) yang diketuai *General Border Committee* (GBC) di bawah lembaga *Join Commission Meeting* RI-Malaysia (JCM).

1. **Perumusan masalah**

Berdasarkan uraian diatas yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “sejauh mana kontribusi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Serawak”.

1. **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

**1. Tujuan penelitian**

Suatu penelitian sudah seharusnya mengandung tujuan dan kegunaan dalam pelaksanaannya, dimana tujuan itu dilaksanakan guna memperoleh data dan informasi berkaitan dengan masalah yang akan di bahas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Kalimantan barat-Sarawak
2. Untuk mengetahui kerjasama antara Indonesia-Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Kalimantan barat-Sarawak
3. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi dari kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dalam pembangunan Infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan barat-Sarawak
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baik yang bersifat teoritis maupun praktis khususnya yang berkaitan dengan perbatasan wilayah antar Negara Indonesia dan Malaysia.
2. Untuk memberi penjelasan kepada pihak lain yang tertarik untuk meneliti masalah serupa dan menjadi referensi tambahan bagi pengembangan serta memberikan ilustrasi pada yang berminat untuk mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai masalah internasional.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian strata satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.
4. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
5. **Kerangka Teoritis Penelitian**

Supaya peneliti memenuhi kaedah-kaedah keilmuan serta dalam mempermudah proses penelitian, perlu di paparkan teori-teori dan konsep-konsep yang dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian. Rangkaian teori dan konsep ini dimulai dari teori umum, teori menengah, dan selanjutnya teori yang bersifat segala hal, sehingga rangkaian teori tersebut dapat menolong penulis dalam proses penelaahan masalah yang berkaitan dengan konteks yang diteliti.

Hubungan Internasional secara umum adalah kerjasama antar Negara, yaitu unit politik yang didefinisikan secara global untuk menyelesaikan berbagai masalah. Menurut UU NO.37 Tahun 1999, hubungan internasional adalah kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat dan internasional yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah, lembaga Negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, LSM atau warga Negara. [[14]](#footnote-14)

Isu yang muncul dalam Hubungan Internasional dewasa ini, merupakan suatu isu yang sifatnya luas, seperti kajian mengenai isu perusahaan multinasional, interdepedensi ekonomi, kemanusiaan, organisasi internasional, LSM internasional, gender, HAM, isu terorisme, serta isu yang tidak kalah mendominasi yaitu isu perbatasan wilayah antar negara. Menurut **J.C. Johari**, hubungan internasional merupakan sebuah studi tentang interaksi yang berlangsung diantara Negara-negara berdaulatdisamping itu juga studi tentang pelaku-pelaku non Negara (*non states actors*) yang prilakunya memiliki dampak terhadap tugas-tugas Negara.[[15]](#footnote-15)

Dalam konteks ini, politik internasional atau politik luar negeri suatu negara merupakan suatu pola atau skema dari cara dan tujuan secara terbuka dan tersembunyi dalam aksi negara tertentu terhadap negara lain ataupun sekelompok negara lain, yang merupakan perpaduan dari tujuan dan kepentingan nasional suatu negara. [[16]](#footnote-16)Politik luar negeri merupakan strategi dan taktik yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain, atau dalam arti lebih luas politik luar negeri merupakan pola prilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Politik luar negeri juga berhubungan dengan proses pembuatan keputusan untuk menentukan pilihan tertentu.

Dalam menjalankan politik pasti berkaitan dengan diplomasi. Diplomasi merupakan seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila dengan cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan.[[17]](#footnote-17)

Diplomasi dilakukan sebagai pengaplikasian dari politik luar negeri suatu negara dimana politik luar negeri merupakan salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Namun, dengan kata lain diplomasi diartikan sebagai pencegah perang, artinya ketika suatu proses diplomasi berhasil maka perdamaian akan tercipta namun jika gagal maka damai untuk melindungi *national interest* gagal. Hal ini, berbanding lurus dengan pernyataan clausewits seorang pakar strategi jerman, yang menyatakan bahwa :

**‘’diplomasi merupakan alat untuk mencegah perang. Apabila diplomasi gagal, melalui cara damai tidak berhasil, maka perang merupakan jalan terakhir. Perang adalah alat kebijakan luar negeri, manakala cara damai dalam melindungi kepentingan nasionalnya gagal. Dengan demikian perang dilancarkan setelah diplomasi gagal’’.[[18]](#footnote-18)**

Dalam melakukan diplomasi, biasanya sebuah negara menunjukan perwakilannya yang kita kenal dengan nama diplomat. Hal ini sesuai dengan pendefinisian diplomasi yang dikemukakan oleh **Ellis Briggs** (dalam Dinh, 1987:2) yaitu diplomasi adalah sebuah kegiatan urusan official dengan cara mengirimkan seseorang untuk mewakili pemerintahan. Tujuan diplomasi adalah untuk menciptalkan persetujuan dalam kacamata kebijakan.[[19]](#footnote-19)

Berdiplomasi tidak bisa dipisahkan dengan negosiasi atau perundingan, dimana dalam setiap perundingan internasional perlu adanya *skill* khusus untuk melakukan diplomasi yang lebih *soft* melalui negosiasi agar kepentingan nasional dapat tersalurkan dengan baik. Negosiasi merupakan proses yang sering sekali kita lakukan dalam hidup dan sering pula kita tidak sadar kalau kita tengah melakukan negosiasi. ‘’negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan’’.[[20]](#footnote-20)

Negosiasi dalam hubungan internasional sangat diperlukan mengingat bahwa dalam setiap masalah dalam berdiplomasi masing-masing negara membawa kepentingan nasional, dengan adanya proses diplomasi dan proses negosiasilah negara satu dengan yang lainnya dapat menjalin hubungan kerjasama. Dalam hubungan internasional dikenal dengan teori 3C+1I, yaitu; *cooperation, competition, conflict and integration.* Jadi, dalam berdiplomasi jika diplomasi atau negosiasinya berhasil maka akan tercipta kerjasama. Jika tidak bisa saja terjadi konflik atau persaingan diantaranya.

Negosiasi tercantum di dalam bab I ketentuan umum UU No.30 th 1999 tentang penyelesaian sengketa. [[21]](#footnote-21)Negosiasi biasanya juga digunakan untuk menyelesaikan masalah, seperti dalam masalah konflik perbatasan dimana dalam menyelesaikan konflik perbatasan tersebut pasti memiliki kendala-kendala sehingga memerlukan negosiasi yang mendalam. Tujuan dilakukannya negosiasi adalah mendapatkan atau memenuhi kepentingan kita yang telah direncanakan sebelumnya dimana hal yang diinginkan tersebut disediakan atau dimiliki oleh orang lain sehingga kita memerlukan negosiasi untuk mendapatkan yang diinginkan.

Terkait dengan batas wilayah negara, setiap gangguan terhadap prinsip negara kesatuan selalu mengundang emosi kecemasan, ketakutan, ataupun kemarahan di kalangan rakyat yang memiliki patriotisme untuk membela prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[22]](#footnote-22)Dan hal tersebut tertuang dalam pasal 25A undang-undang dasar 1945, [[23]](#footnote-23)yang tertulis sebagai berikut ‘’Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang’’.

Sedangkan pasal 18 ayat (1) berbunyi: ‘’Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang’’.[[24]](#footnote-24)

Indonesia kerap kali bersengketa dengan Malaysia mengenai perbatasan wilayah. Batas adalah tanda pemisah antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, baik berupa tanda alamiah maupun buatan. Penetapan dan penegasan batas wilayah suatu negara dirasakan sangat penting dan mendesak, hal tersebut didasarkan pada fakta semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunnan yang memerlukan ruang baru bagi kegiatan tersebut. Kebutuhan akan ruang ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hilang atau berubahnya batas wilayah suatu negara. Apabila hal tersebut tidak diantipasi, bukan tidak mungkin akan muncul sengketa dan saling klaim terhadap wilayah suatu negara oleh negara lain.

Ketika berbicara masalah perbatasan Indonesia maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep kepentingan nasional *(National Interest).* pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.[[25]](#footnote-25)

Hubungan diplomatik antara negara diartikan sebagai ‘’*the conduct by Government officials of negotiations and other relations between nations’’* (yang secara bebas bearti tindakan oleh pemerintah secara resmi yang terkait dengan negosiasi dan hubungan lainnya antar negara), dalam keputusan Presiden RI nomor 108 tahun 2003 tentang organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dinyatakan bahwa perwakilan Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa Negara dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional. [[26]](#footnote-26)

Kedaulatan suatu negara secara ekplisit maupun implicit tampak dari eksistensi batas-batas wilayahnya. Tanpa adanya batas-batas wilayah, suatu negara akan sulit diakui keberadaanya didunia internasional sekaligus eksistensi sebagai subyek hukum internasional. Berkaitan dengan kedaulatan, **Jean Bodin**“ menyatakan bahwa kedaulatan merupakan atribut dan ciri khusus dari suatu negara. Tanpa adanya kedaulatan, maka tidak akanada yang namanya Negara”.[[27]](#footnote-27)

Lain daripada itu, **Yudha Bakti Ardiwisastra**mengatakan “bahwa dalam perkembangannya, pengertian kedaulatan mengalami berbagai perubahan, dimana negara dikatakan berdaulat apabila negara tersebut mampu dan berhak mengatur serta mengurus sendiri kepentingan-kepentingan dalam negeri dan luar negeri, dengan tidak bergantung kepada negara lainnya”.[[28]](#footnote-28)

Kekuasaan tertinggi (kedaulatan) dalam mengatur dan mengurus rakyat, daerah maupun pemerintahannya disebut kedaulatan ke dalam (intern sovereignity), sedangkan kekuasaan tertinggi untuk berhubungan dengan negara lain disebut kedaulatan ke luar (extern sovereignity).[[29]](#footnote-29)

Kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, dimana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi yang dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, diluar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.[[30]](#footnote-30)Berkenaan dengan hal tersebut, kedaulatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu sudah tunduk pada pembatasan-pembatasan yang berupa hukum internasional maupun kedaulatan dari sesama negara lainnya.Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan pula bahwa pada masa kini kedaulatan negara merupakan sisa dari kekuasan yang dimiliki dalam batas-batas yang ditetapkan melalui hukum internasional.

Berdasarkan pengertian tersebut maka kedaulatan memiliki sifat asli, tidak terbagi-bagi, mutlak, dan permanen. Kedaulatan bersifat asli karena kekuasaan yang tetinggi itu tidak berasal dari pemberian kekuasaan yang lebih tinggi. Kedaulatan itu bersifat tidak terbagi-bagi artinya utuh dimiliki oleh pemegang kedaulatan itu tanpa dibagi kepada pihak lain. Kedaulatan itu bersifat permanen, artinya kedaulatan itu tetap, tidak berubah berada dalam kekuasaan pemegang kedaulatan tersebut.Dengan demikian, kedaulatan sebagai kekuasaan tetinggi.Jika dikaitkan dengan pemerintahan, pemerintah adalah lembaga yang diberi mandat atau wewenang oleh lembaga yang lebih tinggi untuk memegang kedaulatan dalam negara.

Suatu negara yang berdaulat selalu saja tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lain. Hukum internasiuonal adalah bagian hukum yang mengatur aktifitas bersekala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai prilaku dan hubungan antar negara namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga mengurusi struktur dan prilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.

Hukum internasional adalah hukum bangsa-bangsa, hukum antar bangsa atau hukum antar negara.Hukum bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan natar raja-raja zaman dahulu.Hukum antar bangsa menunjukan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara.[[31]](#footnote-31)

Guna mengatur penggunaan dan pengamanan wilayah, mengatur hubungan masyarakat dengan wilayah, serta mengatur dan membina tata tertib dalam masyarakat, dirasakan perlu adanya kekuasaan. Kekuasaan ini dipegang dan dijalankan oleh pemerintah negara. Dengan kata lain pemerintah adalah perwakilan negara untuk menjalankan kekuasaan negara untuk mencapai tujuan negara. Jadi, untuk tercapainya ketertiban dalam masyarakat, maka yang menjalankan kekuasaan adalah pemerintah sebagai pemegang kedaulatan. Pemerintah yang berdaulat adalah adanya kekuasaan tertinggi yang merdeka dari pengaruh suatu kekuasaan lain. Kedaulatan itu memiliki dua jenis yaitu, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.

Dalam konteks kedaulatan negara indonesia, kedaulatan intern negara Indonesia dapat diajukan dengan bentuk dan bangunan Negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berciri nusantara, sebagaimana tertuang dalam pasal 25A undang-undang dasar 1945. Hal tersebut pada dasarnya merupakan manifestasi dari aspek geopolitik negara indonesia yaitu wawasan nusantara. [[32]](#footnote-32)Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa kedaulatan internal Indonesia dimanifestasikan melalui wawasan nusantara.

Konsep wawasan nusantara pada mulanya dianggap orang sebagai perwujudan “konsep kekuatan” yang tercermin dalam berbagai wawasan, dimana segenap potensi nasional kita hendak dituangkan kedalam salah satu kekuatan. Pada waktu itu, belum tampak adanya satu kesatuan wawasan yang utuh dan menyeluruh yang sekaligus berperan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Hal tersebut tercermin dalam bentuk integrasi yang serasi dan seimbang dari wawasan benua [[33]](#footnote-33)yang merupakan manifestasi dari *Land power*, wawasan bahari yang merupakan manifestasi dari *sea power*, serta wawasan dirgantara yang merupakan perwujudan dari *Air Power*.[[34]](#footnote-34)Pemanfaatan secara optimal ketiga kekuatan tersebut akan dapat menjadi pedoman bagi pembinaan kelangsungan hidup bangsa Indonesia sebagai pedoman bagi pembinaan kelangsungan hidup bangsa dan sekaligus sebagai wawasan nasional bagi bangsa indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ideology, politik, sosial budaya, ekonomi, dan satu kesatuan pertahanan dan kemanan secara *de jure* mulai berlaku sejak ditetapkannya TAP MPR No.IV/MPR 1973.[[35]](#footnote-35)

Kedaulatan ekstern [[36]](#footnote-36)adalah kemampuan suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain atau dengan subyek hukum internasional lainnya, melaului kerjasama dalam berbagai bidang yang saling menguntungkan kedua negara. Dalam kaitan dengan kedudukan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemampuan berhubungan dnegan negara lain berpijak pada konsep “hidup berdampingan secara damai” dan prinsip “bertetangga yang baik”. Konsep dan prinsip dasar tersebut tercermin dalam tindakan-tindakan yang saling menghormati intergrasi dan kedaulatan territorial masing-masing negara, saling tidak melakukan agresi, saling tidak mencampuri urusan internal masing-masing negara, persamaan kedudukan dan sling menguntungkan, serta hidup berdampingan secara resmi.

Dalam kaitan itu**, I Wayan Partiana** menyatakan bahwa konsep dan prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui perjanjian internasional yang disepakati oleh kedua negara dan dirumuskan secara tertulis serta tunduk terhadap ketentuan yang diatur oleh hukum internasional.[[37]](#footnote-37)

Tanpa adanya batas-batas wilayah, suatu negara akan sulit diakui kebaradaanya di dunia internasional sekaligus eksistensinya sebagai subyek hukum internasional.

**Jusnadi** menyatakan bahwa :

**“batas wilayah atau perbatasan suatu negara yang notabene juga termasuk unsur-unsur geografis memgang pernan yang sangat penting bagi penguatan potensi pertahanan dan keamanan nasional baik dari aspek ideology, politik, sosial budaya, perekonomian, maupun dari aspek hankam itu sendiri”.[[38]](#footnote-38)**

Pandangan ini sejalan pula dengan apa yang tercantum pada pasal 1 *Montivideo C*onvention *on the Right and Duties of states,* 1933 yang menetapkan bahwa sebagai suatu kawasan, negara harus memiliki empat kualifikasi[[39]](#footnote-39), yaitu :

1. Memiliki penduduk yang tetap
2. Batas-batas wilayah kedaulatan yang jelas
3. Pemerintahan yang efektif dan
4. Kemampuan untuk menjalin kerjasama dan hubungan dengan negara lain

Pandangan tersebut diperkuat dengan alasan politik teritorial suatu negara ditandai dengan adanya ketegasan dna kejelasan garis batas wilyah politik yang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :

1. Garis batas yang telah mendapat pengakuan dunia internasional dan
2. Garis batas yang masih dalam sengketa

Terkait dengan penelitian ini, pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *boundaries* dan *frontier.*[[40]](#footnote-40)Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapai dan mempunyai nilai yang strategis bagi kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut *ftontier* karena posisinya yang terletak di depan (front) atau dibelakang (hinterland) dari suatu negara. Sedangkan istilah *boundary* digunakan karena funsinya yang mengikat atau membatasi suatu unit politik, dlam hal ini adalah negara. Semua yang terdapat didalamnya terikat menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh serta saling terintegrasi satu dengan yang lain.[[41]](#footnote-41)

Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa *boundary* tidak selamanya ditaati oleh penduduk perbatasan (terutama didaerah tepencil) yang seenaknya mengadakan lintas batas untuk mengunjungi sanak saudara di sebrang *boundary* atau saling berdagang secara batas atau seolah-olah tidak ada *boundary.*Interaksi dinamis antar penduduk dua negara atau interaksi dinamis antar dua budaya dapat membentuk satu batas semu atau *frontier* yang berbeda letaknya secara geografis dengan *boundary* aslinya.

Dalam perspektif geografi politik, batas wilayah suatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu menurut fungsinya (klasifikasi fungsional) dan menurut terjadinya (klasifikasi morfologis). Klasifikasi fungsional adalah penggolongan perbatasan internasional berdasarkan pada sifat-sifat relasi di antara garis-garis perbatasan dan perkembangan bentang lahan budaya (cultural landscape) dari negara-negara yang dipisah.[[42]](#footnote-42)Sedangkan klasifikasi morfologis (Barlow and Newton, 1971) adalah penggolongan perbatassan internasional berdasarkan proses terbentuknya baik karena merupakan buatan manusia atau karena proses alamiah seperti perbatasan yang berupa pegunungan, sungai, hutan, laut, rawa-rawa dan gurun.

Menurut **Adi Sudirman** secara garis besar terdapat 2 (dua) hal yang menjadi dasar dalam penetapan perbatasan, yaitu ketentuan tertulis dan ketentuan tidak tertulis.[[43]](#footnote-43)Selain aspek yuridis normatif dan empiris[[44]](#footnote-44), dalam kajian atau studi terhadap perbatasan wilayah suatu negara terdapat sudut pandang atau perspektif yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arti pentingnya penataan dan penetapan batas wilayah terhadap kedaulatan suatu negara, yaitu perspektif geopolitik.Geopolitik dapat dikatakan sebagai perkembangan dari geografi politik, dimana negara dipandang sebagai suatu organism yang hidup dan berkembang dari wkatu ke waktu.

Hakekat geopolitik adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan konstelasi geografis negara, dengan memanfaatkan posisi geografis yang strategis demi penyelenggaraan pemerintah dan berbagai penentuan kebijakan secara rasional berdasarkan realitas yang sesuai dan sejalan dengan cita-cita nasional.[[45]](#footnote-45)

**Stephen B. Jones** membagi ruang lingkup pengelolaan wilayah perbatasan dalam empat bagian, yaitu: *allocation, delimination, demarcation* dan *administration/management.* Keempat ruang lingkup pengelolaan perbatasan tersebut saling terkait satu dengan lainnya yang menandakan bahwa keempatnya merupakan satu rangkaian pengambilan keputusan yang saling berkaitan dalam pelaksanaannya.[[46]](#footnote-46)

Merujuk pada teori yang dikemukakan Jones di atas, secara garis besar terdapat tiga isu utama dalam pengelolaan wilayah perbatsan antar negara, yaitu:

1. Penetapan garis batas baik darat maupun laut
2. Pengamanan wilayah perbatasan dan
3. Pengembangan wilayah perbatasan

Dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan Negara Indonesia masih terdapat persoalan-persoalan dalam ketiga isu utama tersebut.[[47]](#footnote-47)

**Atas dasar tersebut penulis membuat asumsi sebagai berikut :**

Asumsi yang ditarik berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan diatas bahwa kondisi perbatasan Indonesia - Malaysia dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Penilaian dari aspek daerah tertinggal digolongkan dalam lemahnya perekonomian dan rendahnya kualitas pendidikan. Secara fisik kondisi wilayah perbatasan jalannya rusak dan sulit di tembus dengan saran perhubungan biasa atau kendaraan roda empat. Kondisi masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan kalbar sebagain besar masih miskin dengan tingkat kesejahteraan rendah, tertinggal, dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan secara umum tidak jauh berbeda dengan masyarakat Malaysia. Sejauh ini bentuk kerjasama yang dilakukan antara Indonesia - malaysia terpusat pada pola perdagangan tradisional yang dilakukan masyarakat Badau. Memang saat ini pemerintah telah mengalokasikan angggaran untuk membuat pasar dengan bangunan yang baik dan memadai namun sampai sekarang pasar tersebut yang selesai di bangun tahun 2002 dan di renovasi pada tahun 2015 belum resmi di oprasikan. kontribusi dari kerjasama Indonesia - Malaysia dalam pengelolaan kawasan perbatasan sampai sekarang ini belum dikatakan menuju masyarakat sejahtera dan berdaya saing baik, baik dari segi pendapatan maupun kualitas pendidikan.

1. **Hipotesis**

Hipotesis adalah pernyataan yang bersifat dugaan mengenai hubungan dua variable atau lebih. Berdasarkan permasalahan dan kerangka teoritis yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba menyimpulkan hipotesis sebagai berikut:

**”Jika kerjasama Indonesia - Malaysia di wilayah perbatasan yang dilakukan dengan cara sosial ekonomi (pembangunan pos pemeriksa lintas batas dan perdagangan bebas), maka perbatasan Indonesia-Malaysia akan semakin sejahtera dan maju ditandai dengan adanya pembangunan infrastruktur pembangunan pos pemeriksa lintas batas dan perbaikan jalan perbatasan”**

1. **Operasional Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variable dalam hipotesis**  **(teoritik)** | **Indikator**  **(empirik)** | **Verifikasi**  **(analisa)** |
| **Variable bebas:**  Jika kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan Kalimantan Barat-Serawak dilakukan dengan cara sosial ekonomi (pembangunan pos pemeriksa lintas batas dan perdagangan bebas) | adanya pembentukan Sosek Malindo mengacu pada Keppres No.13 tahun 2001 | pembentukan Tim Koordinasi kerjasama sub Regional antar negara (Pemerintah Kalbar dan Sarawak) di bidang sosial ekonomi kedua negara.  (sumber: www.wilayahperbatasan.com) |
| Maka masyarakat perbatasan akan semakin maju dan sejahtera di tandai dengan adanya pembangunan infrastruktur pos pemeriksa lintas batas dan perbaikan jalan di wilayah perbatasan. | adanya pertemuan komite perbatasan umum (GBC) Malaysia Indonesia (MALINDO) ke-38 di Kuala Lumpur | membahas berbagai hal termasuk operasi lapangan dan non oprasional (pendidikan,social-ekonomi pelatihan) dilakukan oleh badan-badan dibawah GBC Malindo yang terkoordinasi: *Coordinated Oprations Control Committee* (COCC), Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB), Joint Police Cooperation Committee (JPCC), dan kumpulan Kerja Sosial Ekonomi (KK Sosek)  (Sumber: www.google.com) |

**4. Skema Kerangka Teoritis**

Malaysia

Indonesia

Sosial Ekonomi

(SOSEK MALINDO)

Program kerja SOSEK MALINDO :

1. Program pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi
2. Program pengembangan SDM
3. Program Pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintahan dan kelembagaan di Pos Pemeriksa Lintas Batas (PPLB)
4. Peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan
5. Program perdagangan lintas batas *(Border trade agreement)*

Adanya pembagunan infrastruktur

Jalan dan Keamanan Pos Pemeriksa Lintas batas (PPLB) di wilayah perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Kalimantan barat

**E. METODE DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

**1. Tingkat Analisis**

Untuk mempermudah dalam memilah-milah masalah yang akan diteliti maka penulis menggunakan tingkat analisi dalam penelitian ini. Tingkat analisa yang dipakai dalam penelitian ini yaitu analisa korelasionis, yaitu suatu kelompok analisa yang unit analisa dan eksplanasinya pada tingkat yang sama.

1. **Metode penelitian**
2. Metode penelitian deskriptif, yaitu metode yang memberikan gambaran, menelaah, dan menganalisis fenomena yang ada berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian yang merupakan masalah yang akltual, di tengah realita yang ada untuk menggambarkan secara jelas fenomena sosial tertentu serta berusaha memecahkan masalah yang dalam prakteknya tidak hanya sebatas pengumpulan data saja melainkan meliputi analisis dari interprestasi data tersebut.
3. **Teknik Pengumpulan Data**
4. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library research),* yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari referensi-referensi buku atau literature sebanyak-sebanyak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, laporan lembaga pemerintahan maupun non-pemerintah, dan data-data yang terdapat dalam website atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.
5. Wawancara

Cara memperoleh data dengan melakukan langsung kontak pembicaraan dengan tokoh yang terkait dengan judul penelitian, metode ini dilakukan untuk mendukung dalam melengkapi data-data penelitian.

1. **LOKASI DAN LAMA PENELITIAN**
2. **Lokasi Penelitian**

Untuk menunjang data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, penulis menunjang beberapa tempat untuk memperoleh data serta infoemasi yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

1. perpustakaan FISIP Universitas pasundan bandung Jl. Lengkong Dalam 11 No. 17D Bandung
2. Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalimantan Barat
3. Media Internet
4. **Lama Penelitian**

Jangka waktu yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari penyusunan sampai selesai, adalah selama 8 bulan terhitung dari bulan januari 2016 sampai Agustus 2016. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam table 1.2

1. **SISTEMATIKA PENULISAN**

**BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan dan kerjasama antara Indonesia -Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan di Kalimantan Barat khususnya di Nanga Badau.

**BAB II: Proses kerjasama Indonesia-Malaysia dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Kedua Negara**

Bab ini menguraikan menegenai latar berlakang kerjasama wilayah perbatasan, serta diuraikannya teori-teori perbatasan.Dan juga menjelaskan bagaimana program kerjasama pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat.

**BAB III: Tinjauan Kondisi Perbatasan Wilayah Indonesia-Malaysia**

Bab ini menguraikan mengenai kondisi Perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia, kerjasama yang terjadi di antara kedua negara dalam pengelolaan wilayah perbatasan serta perjanjian yang berisi aturan-aturan yang mengikat kedua belah pihak.

**BAB IV: VERIVIKASI DATA**

Bab ini menguraikan mengenai kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam pengelolaan wilayah perbatasan.

**BAB V: KESIMPULAN**

Bab ini merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisi beberapa kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu.

**BAB II**

**KERJASAMA INDONESIA – MALAYSIA DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN KEDUA NEGARA**

1. **Kerjasama Indonesia Malaysia**

Hubungan Indonesia dan Malaysia sebagai Negara yang berbatasan langsung sangat penting untuk dikembangkan serta ditingkatkan lebih lanjut dalam berbagai bidang berdasarkan prinsip saling menghormati, kedaulatan dan integritas wilayah serta prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Adanya faktor kedekatan secara wilayah, sehingga kerjasama atara Indonesia dengan Malaysia, tersebut juga dijalankan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Barat dan Sarawak.[[48]](#footnote-48)

Dalam sektor pangan, perdagangan ekspor pangan melalui wilayah perbatasan Nanga Badau – Lubuk antu mempunyai potensi besar. Masyarakat Nanga Badau sudah merasakan manfaat besar dengan adanya pasar di perbatasan Nanga Badau – Lubuk antu karena mudah memperoleh produk pangan yang dibutuhkan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga poduk lokal di wilayah Kapuas Hulu. Hal tersebut berdampak terhadap meningkatnya peredaran produk pangan Malaysia di wilayah Nanga Badau. Produk pangan asal Malaysia dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui perbatasan setelah memperoleh persetujuan oleh dinas terkait yang bertugas di pos pemeriksa lintas batas di nanga badau.[[49]](#footnote-49)

Dibidang ekonomi, kedua Negara juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dibidang investasi, perdagangan, pertanian, dan transportasi, termasuk kebijakan yang menyangkut mikro finance atau yang berkaitan dengan usaha kecil dan menengah. ‘’Di bidang kesejahteraan rakyat, Indonesia dan Malaysia sepakat melanjutkan kerjasama di bidang pendidikan, kesehatan, pertukaran budaya, dan *people to people contact* sehingga makin kedepan makin erat hubungan kedua Negara.[[50]](#footnote-50)

Sebagian besar wilayah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan saran dan prasarana sosial dan ekonomi yang masih sangat terbatas.Pandangan di masa lalu bahwa daerah perbatasan merupakan wilayah yang perlu diawasi secara ketat karena merupakan daerah yang rawan keamanan telah menjadikan paradigma pembangunan perbatasan lebih mengutamakan pada pendekatan keamanan dari pada kesejahteraan. Hal ini menyebabkan wilayah perbatasan di beberapa daerah menjadi tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan-pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan misi pembangunan nasional, serta meningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.

1. **Pembangunan Nasional dan Perspektif Internasional**

**a. Pembangunan Nasional**

Untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai kawasan beranda depan yang berinteraksi positif dengan negara tetangga, diperlukan upaya dan komitmen dari seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, legislatif, dunia usaha, masyarakat adat dan sebagainya. Dari pemerintah diperlukan adanya kebijakan nasional dan strategi pengembangan serta investasi sarana dan prasarana fisik dasar seperti jalan, pelabuhan, air bersih, listrik dan sebagainya. Pihak legislatif perlu mendukung setiap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan kawasan perbatasan, sedangkan dari dunia usaha diperlukan dukungan investasi bagi pengembangan pertumbuhan ekonomi seperti kawasan-kawasan perdagangan, berikat, industri, pariwisata, dan kawasan lainnya.Bagi masyarakat di sekitar perbatasan seperti masyarakat adat, perlu diikutsertakan secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan karena mereka merasa memiliki hak-hak ulayat yang telah ada sejak sebelum Republik berdiri. Namun “pengorbanan‟ masyarakat adat ini perlu disertai dengan *reward* kepada mereka yang diatur secara adil dan transparan. Strategi pengembangan kawasan perbatasan secara umum meliputi:

* 1. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang ke negara tetangga.
  2. Membangun kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity), keamanan (Security), dan lingkungan (environment) secara serasi.
  3. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang langsung berbatasan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan.
  4. Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam hutan tropis(tropical forest) dan kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
  5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan dibidangpendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi.
  6. Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan ekonomi dengan negara tetangga.

Sedangkan strategi pengembangan kawasan perbatasan secara khusus harus disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah di masing-masing kawasan perbatasan. Beberapa model pengembangan kawasan perbatasan darat yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan potensi kawasan perbatasan yang ada antara lain sebagai pusat pertumbuhan, transito, stasiun riset dan pariwisata alam, serta agropolitan. Di dalam masing-masing model tersebut dapat dibangun beberapa komponen pembentuk kawasan perbatasan, seperti PPLB, pelabuhan darat (dry port ), kawasan wisata alam/lingkungan dan budaya, akuakultur, kawasan berikat (bounded zone), kawasan industri, danwelcome plaza.

Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan perlu mempertimbangkan beberapa aspek antara lain pasar di negara tetangga, potensi komoditas daerah, peluang bagi investasi swasta, serta jaminan keamanan, baik di internal maupun yang berhubungan dengan negara tetangga. Sedangkan konsep pengembangan kawasan perbatasan laut perlu lebih ditekankan pada upaya pengembangan pulau-pulau terluar yang tersebar dari mulai Selat Malaka, kepulauan Sangihe Talaud sampai di bagian selatan yaitu Pulau Wetar beserta kawasan di sekitarnya. Pulau-pulau terluar yang merupakan “halaman depan” negara di wilayah laut, harus dikembangkan segera sesuai fungsi dan potensi pulau. Masalah yang sering ditemui di sebagian besar pulau kecil terluar antara lain adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana dasar dan ekonomi, tidak terjaga oleh aparat keamanan, penduduknya lebih banyak berorientasi ke negara tetangga karena letak pulau yang lebih dekat ke negara tetangga, sangat minimnya akses informasi terhadap negara sendiri, dan sebagainya.

* 1. **Kebijakan dan Program yang Dilaksanakan**

Pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu komitmen dan kebijakan pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2004-2025, salah satu arah kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia dilakukan melalui pengembangan kawasan perbatasan termasuk pulau-pulau kecil terluar yang selama ini luput dari perhatian. Pengembangan kawasan perbatasan dikemukakan pula secara lebih tegas di dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 khususnya dalam agenda pengurangan ketimpangan antar wilayah.Salah satu sasaran pengurangan ketimpangan antar wilayah adalah terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi ‟yang terintegrasi dan sinergis”. Untuk mencapaisasaran ini, kebijakan pembangunan jangka menengah diarahkan pada upaya untuk pengembangan kawasan perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking. Orientasi *outward looking* dimaknai kedalam upaya-upaya untuk memanfaatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Adapun pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan, juga diperlukan pendekatan kesejahteraan, termasuk pendekatan lingkungan. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, telah ditetapkanProgram Pengembangan Wilayah Perbatasan yang dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu: (1) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum internasional; dan (2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial dan budaya, serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga. Kegiatan pokok terkait yang dilaksanakan untuk memfasilitasi pemerintah daerah antara lain :

1). Penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi;
2. peningkatan kapasitas SDM;
3. pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan; serta
4. peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan;

2). Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain, penerapan berbagai skema pembiayaan pembangunan seperti: pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), public service obligation (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, penerapanuniversal service obligation (USO) untuk telekomunikasi, serta program listrik masuk desa;

3). Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antarnegara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional;

4). Peningkatan kerjasama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, termasuk hasil hutan (illegal logging) dan perdagangan manusia (human trafficking), sekaligus mengupayakan kemudahan pergerakan barang dan orang secara sah, melalui peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan.

5). Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.[[51]](#footnote-51)

**b. Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kalimantan Barat**

Perekonomian di perbatasan Kalimantan masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini bisa dilihat dari persentase terhadap total PDRB di tiap-tiap kabupaten. Walaupun hampir semuanya mengalami penurunan persentase, tetapisektor pertanian ini masih merupakan tulang punggung perekonomian terutamadi perbatasan.Sektor berikutnya yang dominan adalah perdagangan dan industri. Disebagian besar kabupaten, sektor perdagangan merupakan sektor kedua setelah pertanian yang merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB-nya, baru kemudian sektor industri. Namun beberapa kabupaten lain seperti Sanggau, sektor industri menyumbang lebih besar dibanding sektor perdagangan. Semakin ke pedalaman suatu kabupaten semakin besar pula peran dan kontribusi sektor primer (produksi). Ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian suatu daerah, khususnya di kabupaten daerah perbatasan. Sebagian besar penduduk di wilayah perbatasan bermata pencaharian dibidang pertanian. Petani yang ada sebagian besar masih bercocok-tanam dengan sistem ladang berpindah. Selain itu terdapat pula kelompok masyarakat perambah hutan yang mencari hasil hutan sebagai mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian lain adalah di bidang perikanan, sebagai pedagang, buruh, dan Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri.

1. **Perdagangan Lintas Batas**

Untuk melihat kegiatan perekonomian di pos lintas batas, dapat dilihat dari banyaknya kendaraan yang keluar dan masuk melalui pintu perbatasan.Jumlah kendaraan yang melintasi perbatasan di Entikong, khususnya yang berasal dari Kalimantan Barat ke Sarawak, mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Gambaran lain dari tingginya kegiatan perekonomian diperbatasan dapat dilihat pula dari arus nilai barang yang selama ini terjadi. Padatahun 2000 tercatat surplus arus barang untuk Indonesia senilai Rp 2,6 milyar. Volume perdagangan antara Sarawak dengan Indonesia juga masih sangat kecil.Selama tahun 2000 nilai impor Sarawak dari Indonesia berjumlah sekitar RM 2.000.000.Surplus perdagangan antara Sarawak dengan Indonesia pada tahun tersebut masih berpihak kepada Indonesia. Perdagangan lintas batas antara Sabah dan Indonesia melalui pelabuhan Tawau sepanjang tahun 2000,tercatat sebesar RM 83.825.007.89, yang terdiri dari impor sebesar RM71.658.193.37, dan ekspornya sebesar RM 19.408.777,84. Secara keseluruhan surplus dari perdagangan lintas batas antara Sabah dan Indonesia melalui pelabuhan Tawau adalah sebesar RM 59.252,53.

Perdagangan lintas batas tidak hanya memperdagangkan produk hasil dari daerah perbatasan saja, namun meliputi juga berbagai produk hasil dari daerah daerah diluar wilayah perbatasan. Dengan adanya hubungan pola perdagangan lintas batas ini, barang-barang dari Indonesia yang masuk ke Sabah terutama kayu bantalan, kayu balak, kayu gergajian (papan) serta rotan mentah. Disamping itu barang-barang lainya yang masuk ke Sabah seperti kayu malam, sabun, pakaian, kerupuk, gula merah, permen, battery, pasta gigi, udang kering dan udang basah serta lain sebagainya. Ekspor dari Sabah ke Indonesia terutama adalah *wafer,* *soft drink*, pakaian bekas (used clothing), telur ayam, biskuit, ammonium nitrate, mi instan, dan barang-barang lain sebagainya. Perdagangan lintas batas di wilayah perbatasan Kalimantan dewasa ini cukup besar jika dilihat dari volume maupun nilainya. Wilayah perbatasan sebagai perlintasan arus keluar masuk barang maupun jasa tampaknya sudah mulai menjadi pusat aktivitas perdagangan.Tingginya arus keluar masuk barang dan manusia di perbatasan ini tidak dapat dihindari karena adanya kegiatan ekonomi dan perdagangan antara kedua negara. Adanya permintaan (demand) terhadap barang ataupun jasa dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur oleh Serawak dan Sabah, demikian juga permintaan terhadap barang dari Serawak, akan menimbulkan pergerakan perdagangan di wilayah perbatasan tersebut. Potensi perdagangan komoditi antara kedua negara melalui perbatasan cukup besar.Namun karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum sehingga muncul kegiatan-kegiatan ilegal, maka potensi tersebut tidak dapat dinikmati sebagai pendapatan negara maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat diwilayah perbatasan.Bahkan lebih buruk lagi setiap tahun negara dan daerah dirugikan oleh kegiatan ilegal di perbatasan ini. Kegiatan ekonomi lintas perbatasan selain itu perdagangan komoditi adalah pergerakan jasa, dalam hal ini lalu lintas tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Serawak dan Sabah yang cukup tinggi intensitasnya.Jumlah TKI yang bekerjadi Serawak dan Sabah yang melintas lewat pos lintas batas cukup tinggi.Dari data yang tersedia jumlah WNI yang melintasi PPLB Entikong dan Nunukan setiap bulannya mencapai belasan ribu orang setiap bulannya.Sebagian besar dari WNI yang melintasi perbatasan ini merupakan TKI yang bekerja di Serawak.

1. **Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Kalimantan Barat**

Jumlah penduduk di 14 kecamatan perbatasan provinsi Kalimantan Barat yang tinggal diwilayah perbatasan pada januari 2016 diperkirakan berjumlah sekitar 196.247 jiwa. Dengan luas wilayah yang cukup luas, jumlah ini relatif cukup kecil dilihat dari kepadatan atau rata-rata jiwa per kilometer persegi.Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu persoalan bagi daerah perbatasan adalah kurangnya sumberdaya manusia untuk mengisi dan pelaksanakan pembangunan di daerah. Laju pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat pertahun selama kurun waktu 1990 – 2000 sebesar 1,53 persen dan 1,91 persen. Tingginya angka laju pertumbuhan ini dipengaruhi oleh program transmigrasi yang dilaksanakan di Kalimantan Barat.Sementara itu, persebaran penduduk terjadi tidak merata antara satu daerah dengan daerah lainnya.Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa jumlah penduduk di wilayah perbatasan Kalimantan Barat relative kecil dengan persebaran penduduk yang tidak merata.Kondisi di lapangan menunjukkan pusat-pusat permukiman masyarakat tersebar dalam kelompok-kelompok kecil dan tidak merata. Pertumbuhan penduduk paling tinggi, di atas rata-rata berada di Kecamatan Ketungau Hulu (3,33 persen) dan Ketingau Tengah (2,79 persen).

Sebagian besar penduduk di kabupaten-kabupaten perbatasan adalah suku Dayak dan suku Melayu.Suku lainnya adalah Jawa, Batak, Sunda dan lain-lain, yang menetap karena program transmigrasi maupun untuk berusaha di sekitar perbatasan.Suku Dayak dan Melayu di Indonesia ini memiliki tali persaudaraan dengan suku yang sama di Negara Bagian Serawak dan Sabah, Malaysia. Potensi budaya kedua suku mayoritas di wilayah perbatasan antara lain meliputi:

1). Rumah Betang Panjang suku Dayak yang tersebar di beberapa kecamatan. Rumah Betang Panjang di Sungai Ulok Palin Kecamatan Embaloh Hilir merupakan rumah betang panjang tertua dan terpanjang yang ada diKalimantan Barat.

2). Tenunan khas suku Dayak

3). Anyam-anyaman rotan dan manik-manik

4). Seni budaya tradisional masing-masing anak Suku Dayak dan Melayu.

**e. Pendidikan**

Tingkat pendidikan masyarakat di wilayah perbatasan relatif lebih rendah. Persebaran sarana dan prasarana pendidikan yang tidak dapat menjangkau desa desa yang letaknya tersebar dengan jarak yang berjauhan, mengakibatkan pelayanan pendidikan di wilayah perbatasan tertinggal dibanding daerah lain. Di samping sarana pendidikan yang sangat terbatas, minat penduduk terhadap pendidikan pun masih relatif rendah. Fenomena ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk daerah perbatasan yang meninggalkan desa untuk bersekolah namun tidak menamatkan sekolahnya.Seringkali sekolah-sekolah di wilayah perbatasan terpaksa tutup karena murid-muridnya meninggalkan sekolah untuk memanen hasil pertanian mereka. Sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan mudahnya akses informasi yang diterima dari negara tetangga melalui siaran televisi, radio, dan interaksi langsung dengan penduduk di negara tetangga maka orientasi kehidupan seharihari penduduk di perbatasan lebih mengacu kepada Serawak-Malaysia di banding kepada Indonesia. Kondisi ini tentunya sangat tidak baik terhadap rasa kebangsaan dan potensial memunculkan aspirasi disintegrasi.Sebaran penduduk asli di wilayah perbatasan Terlihat bahwa beberapa suku terdapat hubungan baik di wilayah Indonesia maupun di wilayah Malaysia.Ini mengindikasikan adanya hubungan sosial dan budaya yang erat antara masyarakat perbatasan di kedua negara.

**f. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial**

Budaya hidup sehat masyarakat di wilayah perbatasan umumnya masih belum belum berkembang.Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat tentang kesehatan dan pencegahan penyakit yang diperburuk lagi dengan keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis. Sebelum tahun 1980-an banyak penduduk perbatasan yang berobat keSerawak karena mudah dijangkau dan biayanya lebih murah. Namun saat inijumlah penduduk Indonesia di perbatasan yang berobat ke Sarawak semakin sedikit karena setiap kecamatan kini telah memiliki puskesmas.Selain itu dengan semakin intensifnya penanganan pemerintah di sektor kesehatan maka perilaku hidup sehat pada masyarakat secara berangsur-angsur mulai meningkat. Sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kalimantan Barat pada tahun 2000 tercatat sebanyak 190 puskesmas, 716 puskesmas pembantu, dan 261 Puskesmas Keliling. Sedangkan jumlah rumah sakit sebanyak 23 buah dengan jumlah tempat tidur sebanyak 2.008 buah.Di bidang kesejahteraan sosial, kegiatan yang dilaksanakan di Kalimantan Barat menyangkut pengentasan fakir miskin, penanganan penderita cacat, korban bencana alam, dan penyandang masalah sosial.

**g. Mobilitas Penduduk Lintas Perbatasan**

Kegiatan lintas batas perbatasan tradisional antara penduduk Kalimantan Barat ke Serawak dan Sabah, Malaysia telah berlangsung sejak lama karena adanya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak, khususnya suku Dayak dan Melayu, serta mudahnya aksesibilitas ke Serawak maupun Sabah. Hubungan transportasi ke Serawak lebih mudah karena melalui jalan darat, sedangkan hubungan ke kota-kota di Kalimantan Barat dilakukan melalui sungai dengan sarana prasarana yang terbatas dan jarak tempuh yang cukup jauh. Selain hubungan kekerabatan, Serawak memiliki daya tarik ekonomi bagi penduduk Kalimantan di perbatasan untuk mencari nafkah. Perkembangan sosial ekonomi yang cukup pesat di Serawak dan Sabah mengakibatkan penduduk di wilayah perbatasan cenderung berorientasi ke Serawak dan Sabah karena peluang dan kesempatan kerja yang lebih terbuka luas, baik diperkebunan, bangunan, maupun sektor perdagangan (jasa). Di sisi lain, ethos kerja penduduk Serawak dan Sabah yang cenderung menolak bekerja sebagai tenaga buruh membuat kesempatan kerja bagi para imigran Indonesia terbukaluas. Dengan demikian, kegiatan lintas batas saat ini tidak terbatas pada penduduk lokal saja melainkan pendatang dari daerah lain yang ingin mencari nafkah di Serawak dan Sabah.Dengan telah ditentukannya tapal batas perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Serawak (Malaysia) melalui pembangunan pilar sepanjang garis perbatasan, maka sejak 26 Mei 1967 mobilitas penduduk lintas batas diatur dengan mendirikan Pos Lintas Batas di wilayah perbatasan. Pada Oktober 1990 dibuka pos lintas batas internasional pertama di Desa Entikong dan Jagoi Babang. Di kedua pos ini sejak 1 Oktober 1990 dibuka Kantor Imigrasi dan Kantor Bea Cukai untuk menangani lalu lintas orang dan barang dari dan ke Serawak. Dengan didirikannya Pos Lintas Batas ini mobilitas orang dan barang harus menggunakan izin dan dikenakan peraturan kepabeanan.

Dari Survey Kunjungan Asing yang dikumpulkan oleh Kantor Imigrasi Entikong diketahu jumlah kedatangan baik warga negara asing maupun warga Negara Indonesia dari luar negeri lebih banyak.Ini disebabkan banyak tenagakerja Indonesia (TKI) di luar negeri, khususnya di Malaysia. Dalam tahun 2000 rata-rata kedatangan Warga Negara Indonesia per bulan sebanyak 12.967 orangsedangkan Warga Negara Asing sebanyak 1.810 orang. Rata-rata keberangkatan warga Warga Negara Indonesia sebanyak 14.802 orang dan 142 orang warga negara asing.

**h. Perdagangan Manusia (Trafficking Persons)**

Perdagangan manusia atau *Trafficking Person* merupakan salah satu persoalanyang sering terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat. *Trafficking person* mengacu pada *Protocol to Prevent*, *Suppres* a*nd Punish Trafficking Persons, Especially Women and Children,* adalah: penerimaan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan maksud untuk memberlakukan atau menggunakan kekerasan atau bentuk bentuk tekanan lain dari penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau suatu kedudukan yang sifatnya mudah atau dari pemberianatau penerimaan pembayaran atau keuntungan-keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang lain yang memiliki kontrol terhadap orang lain. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia ini sangat beragam. Beberapa diantaranya ialah: kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, konflik sosial, peperangan, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesempatan kerja, lemahnya penerapan hukum, serta pengaruh gaya hidup yang hedonistik. Terbatasnya fasilitas umum dan infrastruktur serta kesempatan kerja yang tersedia di wilayah perbatasan mendorong penduduk untuk menyeberang ke Malaysia untuk bekerja di sektor perkebunan yang tidak membutuhkan ketrampilan tinggi sehinga memunculkan praktek perdagangan manusia.[[52]](#footnote-52)

1. **Paradigma Kawasan Perbatasan Sebagai Halaman Belakang**

Pemerintahan Presiden Jokowi – Jusuf KallaS bertekad merubah paradigma baru pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai "halaman belakang" menjadi "halaman depan" wilayah NKRI dengan cara membangun kawasan perbatasan yang selama ini indentik miskin, tertinggal dan terisolir dari segi ekonomi dan sosial sebagai kekuatan ekonomi negara dan sosial/citra bangsa Indonesia. Munculnya harapan paradigma ini, disebabkan pemerintahan Jokowi yang akan membangun ekonomi kemaritiman sebagai dasar pengelolaan SDA daerah. Sementara rata-rata kehidupan masyarakat perbatasan identik dengan nelayan atau kelautan.

Selama ini persepsi penanganan kawasan perbatasan lebih didominasi pandangan untuk mengamankan perbatasan dari potensi ancaman dari luar (external threat) dan cenderung memposisikan kawasan perbatasan sebagai sabuk keamanan (security belt). Hal ini mengakibatkan kurangnya pengelolaan kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi sumberdaya alam, terutama yang dilakukan oleh investor swasta.[[53]](#footnote-53)

1. **Program kerjasama RI-Malaysia di bidang Ekonomi**

Indonesia dan Malaysia memandang perlunya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan energi, termasuk kerjasama sub regional melibatkan kerjasama dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia – Malaysia -Singapura dan Indonesia – Malaysia - Thailand (IMS dan IMT-GT). Di masa datang, kerjasama bidang perdagangan, investasi dan energi diharapkan bisa lebih berkembang lagi sekaligus meningkatkan perekonomian kedua negara serta membuka lapangan kerja yang memang dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran yang terus meningkat dewasa ini.kedua pemimpin negara sepakat tidak hanya dilakukan antara Pertamina dengan Petronas saja, tetapi juga di bidang kelapa sawit untuk kepentingan minyak sawit (CPO) maupun pengembangan sumber energi dari kepala sawit (bio-energy). Dalam konteks investasi Indonesia akan terus mengembangkan iklim investasi yang lebih baik menyangkut kepastian hukum, kebijakan ekonomi yang lebih kondusif bagi investasi termasuk kebijakan tenaga kerja, sehingga investasi bisa berjalan dengan baik.[[54]](#footnote-54)

1. **Ruang lingkup**

Pembahasan kebijakan dan strategi Nasional ini. Meliputi seluruh kawasan perbatasan darat dan laut yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik perbatasan dengan Negara yang relative lebih maju, setara, ataupun dengan Negara yang baru terbentuk, sedangkan ruang lingkup kebijakan dan strategi nasional ini meliputi analisis dari aspek sektoral dan regional yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan perbatasan.

* 1. **Pasar tradisional Badau**

Impian untuk menjadikan pasar niaga badau sebagai pasar percontohan di perbatasan Badau – lubuk antu bias jadi akan tinggal impian belaka. Pasar badau bahkan bisa kehilangan momentum. Pasalnya pasar yang telah dibangun pada tahun 2002 dan di renovasi pada tahun 2015 oleh pemerintah kabupaten Kapuas hulu hingga kini belum juga dioprasionalkan. bangunan itu nyaris hanya menjadi sebuah ‘’monumen’’ pembangunan pasar.[[55]](#footnote-55)

Masyarakat badau yang bermukiman di perbatasan Badau - Lubuk Antu lebih suka berbelanja di pasar tradisonal perbatasan di lubuk antu Sarawak Malaysia timur. “kami selalu berbelanja di sisni karena harga barang kebutuhan cukup murah dan letak pasar ini snagat dekat dengan perkampungan kami apalagi warga masyarakat di perbatasan badau masih memeiliki hubungan keluaraga dengan masyarakat di perbatasan lubuk antu”. Kata seorang warga badau, cekoi.Bila di amatai dari fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi barang-barang kebutuhan pokok di pasar tradisonal lubuk antu lebih murah di bandingkan di badau.Dampaknya, badau lebih senang berbelanja di pasar tradisonal Malaysia.[[56]](#footnote-56)

* 1. **Kesepakatan kerjasama berdasarkan Memorandum of Understanding (MOU)**

Pemerintah Kalimantan barat dan pemerintah Sarawak telah melakukan penanda tanganan kerjasama (Memorandum of Understanding) guna melegalkan hubungan kerjasama bidang pariwisata dan kebudayaan kedua Negara.[[57]](#footnote-57) MOU tersebut menyepakati adanya peningkatan kerja sama pariwisata di antaranya berupa pemberian potongan harga penerbangan dan hotel di kedua Negara. Kalbar dan Serawak juga menyepakati agar setiap kota/kabupaten di kedua daerah akan memberitahukan semua undangan yang berkaitan dengan bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dengan adanya MOU tersebut diharapkan pemerintah Kalbar agar mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cendrung berorientasi *Inward looking* menjadi *outward looking* sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga. Tujuan dari pengembangan wilayah-wilayah perbatasan adalah untuk:

1. Menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh hukum Internasional
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, sosial, budaya serta keuntungan local geografis yang sangat strategi untuk berhubungan dengan Negara tetangga.[[58]](#footnote-58)
3. **Tingkat pendapatan masyarakat badau**

Impian menjadi “tuan di negri sendiri” adalah filosofi penduduk perbatasan kalimantan sebagai suatu tuntutan perbaikan dan perubahan kualitas hidup. Selaku penduduk pribumi atau pemilik hak dengan kekeyaan alam yang melimpah dan menjadi sumber pendapatan bagi Negara, sudah sepantasnya jika taraf hidap dan tingkat pendapatan per kapita pendududk asli Kalimantan lebih baik dari keadaan sekarang. Hal ini patut dikedepankan karena populasi penduduk di Kalimantan barat saat ini berjumlah sekitar 5.323.985 juta jiwa namun hampir 8,03% dari jumlah penduduk diantaranya masih miskin[[59]](#footnote-59). Masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat asli Kalimantan dan kemampuan ekonomi yang erat kaitannya dengan partisipasi orang asli Kalimantan pada pekerjaan sektor formal di lingkungan pemerintah dan perusahaan swasta maupun sektor informal. Sementara itu, perbandingan jumlah penduduk non Kalimantan dan asli Kalimantan di kawasan perkotaan 60;40 dan non Kalimantan lebih menguasai sektor pekerjaan formal maupun informal.

Berangkat dari permasalahann di atas, maka ada beberapa pokok pikiran yang ingin kami sarankan sebagai ususlan kebijakan di bidang ketenangakerjaan, yaitu pemerintah Kalimantan barat disarankan untuk lebih memberikan ruang, peluang dan kesempatan bagi orang asli Kalimantan untuk memperoleh pekerjaan di semua sektor formal dan informal untuk meningkatkan kesejahteraan.

1. **Keamanan kawasan perbatasan serta pengaruhnya terhadap kegiatan perekonomian masyarakat lokal**

Kawasan perbatasan memiliki peran sentral dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Pembangunan yang terpusat hanya di kota menyebabkan wilayah perbatasan semakin tertinggal. Masalah utamanya terletak pada kondisi infrastrukturnya yang memprihatinkan.Akibatnya, masyarakat di wilayah perbatasan cenderung bergantung pada pasokan barang kebutuhan sehari-hari dari negara tetangga.Untuk mengembangkan potensi di wilayah perbatasan, pemerintah saat ini tengah membangun ‎tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu.Ketujuh Pos itu berada di Entikong (Kabupaten Sanggau), Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), Aruk (Kabupaten Sambas), Wini (Kabupaten Timor Tengah Utara), Motamasin (Kabupaten Malaka), Motaain (Kabupaten Belu), Skouw (Kota Jayapura). Presiden Jokowi memproyeksikan kawasan perbatasan untuk menjadi titik baru pertumbuhan perekonomian. Sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan akan semakin meningkat.[[60]](#footnote-60)

Indonesia baru bias di katakana makmur dan sejahtera kalau kampung atau desa di perbatasan ikut makmur. Ketahanan nasional baru dapat diesbut tangguh apabila seluruh segi kehidupan Negara seperti ekonomi, komunikasi, transportasi, pendidikan dan kesehatan benar-benar di bangun dan di kuatkan di kampung-kampung.

1. Triwidodowutomo.blogspot.com, di akses pada tanggal 25 januari 2016` [↑](#footnote-ref-1)
2. Backwash effect adalah makin bertamabah permintaan masyarakat suatu wilayah kaya atas hasil hasil dari masyarakat miskin berupa bahan makanan pokok seperti beras yang sumbernya dari pertanian masyarakat wilayah miskin [↑](#footnote-ref-2)
3. Muchtareffendiharahap.blogspot.com, di akses pada tanggal 25 januari 2016 [↑](#footnote-ref-3)
4. Prillygeography.blogspot.com, di akses pada tanggal 25 januari 2016 [↑](#footnote-ref-4)
5. Dikutip oleh Sobar Sutisna, Sora Lokita dan Sumaryono, *Boundry Making Theory dan pengelolaan perbatasan di Indonesi.*hlm.1-4 [↑](#footnote-ref-5)
6. Lihat ulasan secara komprehensif dalam Bappenas, 2003.*Strategi dan Model Pengembangan WilayahPerbatasan* [↑](#footnote-ref-6)
7. Arifin, Migrasi penduduk dan implikasinya terhadap Hankam di Wilayah Perbatasan Kalbar-Serawak Malaysia, *Jurnal masalah-masalah Hukum, Undip,* jilid 40 No.2 April 2011, hlm.222. [↑](#footnote-ref-7)
8. http://Kbbi.web.id/egosentrisme, di akses pada tanggal 23 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-8)
9. [www.unisosdem.org](http://www.unisosdem.org), di akses pada tanggal 7 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-9)
10. Association of European Border Region, *Contribution of Cross-Border Co-Operation to Implementing The Lisbon Strategy,* AEBR Annual Conference,20-21 October 2005 In Drrama, European Nestos-Mesta. Hlm.3. [↑](#footnote-ref-10)
11. Guo, *Border-Regional Economic,* Heidelberg, Physica-Verl; Germany, 1996. Hlm.118. [↑](#footnote-ref-11)
12. RongxingGuo, 1996, *Border-Regional…*Op.Cit.hlm.166-120 [↑](#footnote-ref-12)
13. Husnadi, 2004, *Menuju Model Pengembangan Kawasan Perbatasan Darat Antar Negara (Studi Kasus: Kecamatan Paloh dan Sajingan Besar Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat),* Tesis Pada program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.54-55. [↑](#footnote-ref-13)
14. Hedisasrawan.blogspot.com, di akses pada tanggal 6 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-14)
15. <http://stand-up-please.blogspot.com> definisi hubungan internasional menurut para ahli, diakses pada tanggal 6 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-15)
16. [http://yahoo.com/*pengertian*](http://yahoo.com/pengertian) Politik internasional, diakses pada tanggal 6 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-16)
17. RI A Waits Clarificastion from Malaysia: Nuwawea, *The Jakarta Post*, 16 juli 2004 [↑](#footnote-ref-17)
18. http://neetatakky.blogspot.com/2011/05/*definisi-definisi-diplomasi.html,* di akses pada tanggal 6 febuari 2016 pukul 7.30 WIB. [↑](#footnote-ref-18)
19. Dinh, Tranh Van. (1982). *Diplomacy: The Dialogue Between States.* Methuen [↑](#footnote-ref-19)
20. Seng, joo seng; Elizabeth, Ngah-Kiing Lim, *Strategies for Effective Cross – Cultural Negotiation: The Frame Approach,* (Singapore:McGrawHill,2004) hlm. 5 - 6. [↑](#footnote-ref-20)
21. https://erwan29680.wordpress.com pengantar negosiasi, di akses pada tanggal 6 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-21)
22. Soehino, *Ilmu Negara,* (Yogyakarta: Liberty, 2002) hlm. 122 [↑](#footnote-ref-22)
23. Praditarachman.blogspot.com aktualisasi pancasila, di akses pada tanggal 6 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-23)
24. Pshk.uii.ac.id, di akses pada tanggal 6 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-24)
25. Anak Gunung, Benyu Perwita, Yanyan Moch Yani (2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Remadja Rosda Karya [↑](#footnote-ref-25)
26. [www.burung-net.com](http://www.burung-net.com) pengertian diplomatic, di akses pada tanggal 6 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-26)
27. Fred Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik,* (Bandung: Binacipta, 1996) hlm. 108 [↑](#footnote-ref-27)
28. Yudha Bakti Ardiwisastra, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum, (Bandung: Alumni, 1991) hlm. 43 [↑](#footnote-ref-28)
29. [*http://id.wikipedia.org/wiki/kedaulatan*](http://id.wikipedia.org/wiki/kedaulatan)diakses pada 7 januari 2016 [↑](#footnote-ref-29)
30. [*http://thedarkancokullujaba.blogspot.com/kedaulatan-negara.html*](http://thedarkancokullujaba.blogspot.com/kedaulatan-negara.html)diakses pada tanggal 7 januari 2016 [↑](#footnote-ref-30)
31. [www.gurupendidikan.com](http://www.gurupendidikan.com) pengertian hokum internasional, di akses pada tanggal 6 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-31)
32. Alfandi, Widodo. (2002). *Reformasi Indonesia:Bahasan dari sudut pandang Geografi politik dan Geopolitik.* Yogyakarta:Gadjah Mada University. [↑](#footnote-ref-32)
33. Rudolf, Kjjelen. (1864-1922) [↑](#footnote-ref-33)
34. Deposer-asyik-asyik-blogspot.com sejarah wawasan benua, di akses pada tanggal 6 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-34)
35. <https://id.m.wikipedia.org> sejarah lembaga kepresidenan Indonesia, di akses pada tanggal 6 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-35)
36. <https://id.answer.yahoo.com>, di akses pada tanggal 7 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-36)
37. I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional I, (Bandung: Mandar Maju, 2002) hlm. 13 [↑](#footnote-ref-37)
38. Achmad Jusnadi (dkk), op.cit, hal. 41 [↑](#footnote-ref-38)
39. Rajawaligarudapancasila.blogspot.com, di akses pada tanggal 7 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-39)
40. Rodon Pedrason, Bantarto Bandoro, *Reformasin Demokrasi dan Keamanan: Kementrian Pertahanan dan Net Assessment.* Dalam Jurnal “Universitas Pertahanan Indonesia”. Website: Pertahanan.www.idu.ac. di akses pada tanggal 7 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-40)
41. I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional I, (Bandung: mandar Maju, 2002) hlm.. 13 [↑](#footnote-ref-41)
42. Kuswanto, dkk.1986.*Geografi Program Inti*. Solo: tiga serangkai. Di akses pada tanggal 7 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-42)
43. Adi Sumardiman, *Seri Hukum Internasional-* WILAYAH INDONESIA DAN DASAR HUKUMNYA,   
    (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992) [↑](#footnote-ref-43)
44. Ippm.ub.ac.id, di akses pada tanggal 7 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-44)
45. James E Dogherty, *konflik laut Cina Selatan dan Kedaulatan Regional Asia Pasifik, Sudut Pandang indonesia,* (Jakarta: APSINDO, 2001) [↑](#footnote-ref-45)
46. Stephen B.Jones, *A Handbook for Statesmen, Treaty Editor and Boundry Commissioners*(1945) [↑](#footnote-ref-46)
47. Dalam Sobar Sutisna, dkk., “*Boundary Making Theory* dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia”, dalam Ludiro Madu, et. al., (eds.), 2010, *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas,* Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 12 [↑](#footnote-ref-47)
48. <http://bintangkalbar.com/index.php/2012-03-03-14-02-06-12-35/item.681.kerjasama-malaysia-dan-pemprov-kalbar-lebih-diprioritaskan>, diakses pada 8 febuari 2016. [↑](#footnote-ref-48)
49. <http://www.pom.gp.id/index.php/home/berita_aktual/1794>, diakses pada 10 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-49)
50. <http://www.madina.co.id/politik/7776-indonesia-dan-malaysia-jalin-kesepakatan-politik-keamanan-dan-ekonomi.html>, diakses pada tanggal 12 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-50)
51. https://www.academia.edu/5071675/PROGRAM\_PEMBANGUNAN\_KAWASAN\_PERBATASAN [↑](#footnote-ref-51)
52. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,STRATEGI DAN MODELPENGEMBANGAN WILAYAHPERBATASAN KALIMANTAN, 2003 [↑](#footnote-ref-52)
53. http://www.batamtoday.com/berita-50643-Mengelola-Beranda-Terdepan-NKRI.html [↑](#footnote-ref-53)
54. <http://sangpujanggakecil.blogspot.co.id/2014/11/kerja-sama-negara-indnesia-dengan.html> [↑](#footnote-ref-54)
55. <http://www.bappenas.go.id/node/108/968/bagian-ke-1/>. Di akses pada 23 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-55)
56. <http://kalbarhotline.blogspot.com/2015/03/masyarakat-badau-tetap-manfaatkan-pasar.html>. di akses pada 29 febuari 2016 [↑](#footnote-ref-56)
57. <http://www.antaranews.com/berita/321122/kalbar--sarawak-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-pariwisata> [↑](#footnote-ref-57)
58. <http://batas.nappenas.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=54>. Di akses pada febuari 2016 [↑](#footnote-ref-58)
59. Dukcapil.kalbarprov.go.id [↑](#footnote-ref-59)
60. http://www.presidenri.go.id/infrastruktur/strategi-menjaga-kedaulatan-di-kawasan-perbatasan.html [↑](#footnote-ref-60)